



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke	:
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Kepala BNP2TKI
Hari/Tanggal	: Rabu, 3 Juni 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB – selesai
Acara	: Pembicaraan Pendahuluan Program/Kegiatan dan Rencana Kerja BNP2TKI pada RAPBN Tahun 2016
Ketua Rapat	: Dra. Hi. Ermalena MHS/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. orang dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI. B. Kepala BNP2TKI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dibuka pukul 14.30 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendorong BNP2TKI untuk memberikan pelayanan yang optimal pada masa pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan kepada TKI termasuk koordinasi dengan Kementerian Sosial RI dalam proses pemulangan TKI, pendidikan dan latihan kepada calon TKI dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
2. Komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI untuk memberikan prioritas pelayanan dan perlindungan TKI untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas dan kemampuan TKI;
 - b. Mewujudkan Zero TKI Kontrak Pengguna Perseorangan Tahun 2018;
 - c. Memberikan advokasi dan sosialisasi penempatan TKI ke luar negeri;
 - d. Memberikan pendidikan informal dengan metode yang khusus di daerah;
 - e. Melakukan pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya.
 - f. Meningkatkan penyerapan anggaran BNP2TKI tahun 2015;
 - g. Keterbukaan sistem informasi publik terkait SISKOTKLN

dalam program dan kegiatan BNP2TKI tahun 2016.

3. Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah untuk menyusun *Exit Strategy* dalam rangka penyelesaian permasalahan TKI pasca kebijakan Pemerintah terkait penempatan TKI ke luar negeri.

dapatkan penjelasan sementara
besaran Pagu Indikatif BNP2TKI
Rp.415.046.706.000,00 dan usulan
Meeting sebesar Rp.
Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh
Enam Ribu Rupiah), selanjutnya
terhadap Rencana Program Tahun
program tahun 2015 dengan para

BNP2TKI untuk menyampaikan
tahun anggaran 2015 yang
an rencana program dan kegiatan
5 Juni 2015.

4. Komisi IX DPR RI telah men
tentang RKP tahun 2016 dan b
Tahun Anggaran 2016 sebesar R
Tambahkan Hasil Trilateral
(Enam Ratus Delapan Puluh
Puluh Enam Juta Tujuh Ratus
akan dilakukan pendalaman te
2016 dan evaluasi realisasi p
Eselon 1.

5. Komisi IX DPR RI meminta
sandingan program dan kegia
sedang berjalan saat ini denga
tahun 2016 selambat-lambatnya

Rapat diakhiri pukul 16.40 WIB.

Kepala BNP2IKI,



NUSRON WAHID, S.S

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI,

Dra. Hj. ERMALENA MHS
A-536